

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR OLYMPINDO SEJAHTERA POSISI DESEMBER 2025

KANTOR PUSAT

Plaza Kelapa Gading (Ruko Inkopal) Blok B No. 33
Jl. Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240



PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di PT BPR Olympindo Sejahtera sepanjang tahun 2025 dilaksanakan secara konsisten dan menunjukkan perkembangan yang memadai, sejalan dengan upaya Perseroan dalam menjaga kinerja di tengah dinamika perekonomian dan sektor usaha.

PT BPR Olympindo Sejahtera memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai landasan dalam mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing. Penerapan GCG didukung oleh integritas yang tinggi serta pelaksanaan fungsi dan peran seluruh organ Perseroan, khususnya Direksi dan Dewan Komisaris, yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan efektivitas penerapan Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi.

Sebagai lembaga perbankan yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun, PT BPR Olympindo Sejahtera senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha, yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam mewujudkan visi sebagai penyedia layanan perbankan yang terpercaya serta mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah dan pemangku kepentingan.

Dalam implementasinya, Perseroan mengacu pada tiga aspek utama Tata Kelola, yaitu struktur dan infrastruktur, proses, serta hasil penerapan Tata Kelola. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus dalam memastikan bahwa penerapan GCG berjalan secara efektif dan mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat penerapan GCG secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja, pengelolaan risiko, serta penguatan fondasi usaha yang sehat dan berkelanjutan.

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	:	BPR Olympindo Sejahtera
Posisi Laporan	:	Des-25
Alamat	:	Plaza Kelapa gading Blok B No.33, Jl.Raya Boulevard barat,Kelapa gading, Jakarta Utara
Nomor Telepon	:	021 45851085
Modal Inti BPR	:	Rp6.800.646.515,-
Total Aset BPR	:	Rp36.612.303.868,-
Status Audit Ekstern	:	Tidak diaudit
Peringkat Komposit	:	Peringkat 2 (baik)
Faktor Positif (Kekuatan)	:	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola secara umum dengan baik. Hal ini tercermin dari struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan dan pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola.
Faktor Negatif (Kelemahan)	:	Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut ke depannya akan tidak signifikan, hanya memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Kesimpulan Akhir	:	Dalam menerapkan Tata Kelola, BPR memiliki peringkat komposit 2 yang berarti memadai. Manajemen BPR menilai bahwa tata kelola sudah saatnya dilaksanakan di lingkungan bank mengingat BPR salah satu industri perbankan dan lembaga intermediasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR menganut prinsip tata kelola sebagai berikut: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dan kesetaraan. Dengan disusunnya SOP GCG BPR, tata kelola bank akan berjalan baik, Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif. Fungsi kepatuhan, audit intern,audit ekstern akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Nama	Verawaty Jo
Jabatan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut: - Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan - Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain - Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar idak menyimpang dari ketentuan e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain - Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	- Melakukan optimalisasi penyaluran kredit melalui penguatan kinerja tim marketing, termasuk penambahan tenaga pemasaran pada kantor pusat dan kantor cabang. - Memperluas jangkauan pasar kredit melalui pengembangan segmen potensial dan penjajakan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk koperasi yang memiliki kinerja baik. - Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi pemasaran yang lebih terarah serta pengembangan sumber pendanaan baru dengan biaya dana yang lebih efisien. - Melaksanakan upaya penurunan rasio kredit bermasalah (NPL) secara berkelanjutan melalui intensifikasi penagihan, restrukturisasi kredit, serta optimalisasi penggunaan jasa penasehat hukum. - Memperkuat penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, khususnya dalam proses analisis dan pemberian kredit. - Melaksanakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tim marketing, melalui pelatihan internal (in-house training) dan

	evaluasi kinerja secara berkala. 7. Meningkatkan rentabilitas melalui optimalisasi pendapatan bunga kredit, efisiensi biaya operasional, serta percepatan penyelesaian Aset Yang Diambil Alih (AYDA). 8. Menjaga kecukupan permodalan dan melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pemenuhan ketentuan modal inti sesuai regulasi. 9. Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dan kepatuhan, termasuk tindak lanjut atas temuan audit internal dan regulator serta penguatan implementasi APU/PPT. 10. Menindaklanjuti rencana aksi korporasi, termasuk proses akuisisi dan konsolidasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--

Catatan:

Pada saat ini, BPR memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi, sehingga belum memenuhi ketentuan mengenai jumlah minimal Direksi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku; namun demikian, selama periode pelaporan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tetap berjalan secara efektif dan tidak mengganggu kegiatan operasional maupun penerapan fungsi kepatuhan, serta BPR terus melakukan upaya yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan jumlah minimal Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
1.	Nama	Simon Hasan Gunadi
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank c. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.
2	Nama	Rifany Taufik
	Jabatan	Komisaris

	Tugas dan Tanggung Jawab	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan b. d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.
Rekomendasi Kepada Direksi		a. Meningkatkan pertumbuhan kredit secara selektif dan terukur guna mencapai target RBB, melalui optimalisasi kinerja tim marketing serta penambahan sumber daya pemasaran yang kompeten. b. Memperluas segmen dan jangkauan pasar kredit, termasuk pengembangan kerja sama dengan koperasi dan sumber debitur potensial lainnya, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. c. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi pemasaran yang lebih efektif, serta mengupayakan sumber pendanaan baru dengan biaya dana yang lebih efisien. d. Menjaga dan meningkatkan kualitas aset melalui percepatan penurunan rasio NPL secara berkelanjutan, termasuk optimalisasi penagihan dan pemanfaatan jasa penasehat hukum. e. Meningkatkan efektivitas fungsi manajemen risiko dan pengawasan internal dalam proses pemberian kredit guna meminimalkan potensi risiko. f. Melakukan penguatan kinerja tim marketing melalui pelatihan (in-house training) serta evaluasi produktivitas secara berkala. g. Mendorong peningkatan rentabilitas melalui optimalisasi pendapatan bunga kredit, efisiensi biaya operasional, serta penyelesaian AYDA secara tepat waktu. h. Menjaga kecukupan permodalan dan memastikan pemenuhan ketentuan modal inti sesuai dengan regulasi yang berlaku. i. Meningkatkan penerapan tata kelola, termasuk perbaikan proses operasional, kepatuhan terhadap ketentuan APU/PPT, serta tindak lanjut atas temuan audit internal maupun regulator. j. j. Melakukan langkah strategis terkait rencana aksi korporasi, termasuk proses akuisisi dan konsolidasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite (Jika Ada)

No	
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
5	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
Catatan: Sehubungan dengan modal inti BPR yang masih di bawah Rp50 miliar, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta komite lainnya. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi yang menjadi tugas komite dimaksud tetap dilaksanakan secara memadai oleh Direksi dan/atau pejabat terkait guna memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko berjalan secara efektif.	

4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen (Ya/Tidak)
1				
2				
3				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:				
Tindak lanjut atas rekomendasi terkait struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, mengingat BPR belum diwajibkan untuk membentuk komite sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku sehubungan dengan modal inti yang masih di bawah Rp50 miliar.				

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Verawaty Jo	-	0%	-	0%
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR					

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Simon Hasan Gunadi	-	0%	-	0%
2	Rifany Taufik	-	0%	-	0%
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR					

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Verawaty Jo	-	-	0%
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Simon Hasan Gunadi	-	-	0%
2	Rifany Taufik	-	-	0%
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Verawaty Jo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.				

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Simon Hasan Gunadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rifany Taufik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.				

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Dan Pemegang Saham Pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Verawaty Jo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi				

lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Simon Hasan Gunadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rifany Taufik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.				

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	Rp282.000.000,-	2	Rp142.560.000,-
2	Tunjangan	1	Rp72.519.485,-	2	Rp13.922.150
3	Tantiem	1	Rp24.000.000,-	2	Rp 11.880.000
4	Kompensasi Berbasis Saham	1	Rp0	2	Rp0
5	Remunerasi Lainnya	1	Rp0	2	Rp0
	Total Remunerasi		Rp378.519.785,-		Rp168.362.150,-
	Jenis Fasilitas Lain				
1	Perumahan	1	Rp0	2	Rp0
2	Transportasi	1	Rp36.917.360	2	Rp0
3	Asuransi Kesehatan	1	Rp0	2	Rp0
4	Fasilitas Lainnya	1	Rp0	2	Rp0
Total Fasilitas Lainnya			Rp36.917.360		
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Variabel	Perbandingan/Rasio (a)/(b) : 1
a.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.33
b.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
c.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.008
d.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.91
e.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.82
Penjelasan Lebih Lanjut:		
Sudah sesuai dengan SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR		

I. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	30/04/2025	2	Kinerja 3 bulanan,Portfolio kredit,NPL, dan AYDA
2	13/08/2025	2	Kinerja 3 bulanan,Portfolio kredit,NPL, dan AYDA
3	29/10/2025	2	Kinerja 3 bulanan,Portfolio kredit,NPL, dan AYDA
4	30/01/2026	2	Kinerja 3 bulanan,Portfolio kredit,NPL, dan AYDA

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonference	
1	Simon Hasan Gunadi	4	0	100.00
2	Rifany taufik	4	0	100.00
Penjelasan Lebih lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris hadir di kantor BPR secara berkala, yakni satu kali setiap minggu, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.				

K. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan/atau outsourcing) adalah sebagai berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
Dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	2	0
Total	4	0
Penjelasan Lebih lanjut :		
Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian diantaranya: Jumlah permasalahan hukum perdata yang dalam proses selesai sebanyak 2 kasus.		

M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Penjelasan Lebih lanjut :							
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan. Pada tahun 2025 Tidak ada Daftar Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.							

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Penjelasan Lebih lanjut :				
Selama Tahun 2025, BPR Tidak Melakukan Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik (Nihil).				

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Olympindo Sejahtera untuk posisi 31 Desember 2025 kami sampaikan.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkesinambungan, demi menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.

Kami menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan ini telah disusun dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 April 2026

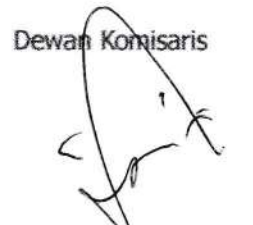
Atas Nama PT BPR Olympindo Sejahtera

Direksi


Verawaty Jo
Direktur YMF Kepatuhan



Dewan Komisaris


Simon Hasan Gunadi
Komisaris Utama